

BAB II

BENTUK-BENTUK KONSISTENSI DUKUNGAN PEMERINTAHAN SBY PADA UPAYA KEMERDEKAAN PALESTINA

Pada bab ini akan dibahas mengenai konsistensi bantuan RI terhadap Palestina pada masa pemerintahan SBY dibandingkan dengan masa pemerintahan sebelumnya, bentuk-bentuk dukungan Indonesia terhadap upaya kemerdekaan Palestina, pada masa pemerintahan SBY dalam fora internasional. Keterlibatan Indonesia secara aktif dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI), keanggotaan dalam Gerakan Non Blok (GNB) ataupun Konferensi Asia Afrika (KAA), keanggotaan tidak tetap dalam Dewan Keamanan PBB, serta keanggotaan dalam Dewan Majelis HAM PBB, diwujudkan sebagai peran diplomasi dalam percaturan internasional.

A. Politik Luar Negeri RI Terhadap Palestina Sebelum Pemerintahan SBY

Apabila kita menoleh ke belakang, sebenarnya sebelum kemerdekaan Indonesia diakui oleh Negara lain, hubungan antara RI dengan Palestina sudah terbentuk. Di awal kedaulatan kemerdekaan Indonesia, yang mana saat itu Negara Indonesia dipimpin oleh Bapak Proklamator yaitu Ir. Soekarno dan Muh. Hatta mencetuskan kemerdekaan RI kepada dunia, Palestina segera memberi ucapan selamat kepada Indonesia atas diakuinya kemerdekaan dari seluruh dunia. Sesuai dengan resolusi PBB nomor 242 dan 338, sesuai dengan dasar perdamaian Timur Tengah, bangsa Indonesia turut membantu perdamaian di palestina. Hal ini sesuai

dengan isi UUD 1945, yang mana mendukung dan membantu kemerdekaan tiap-tiap bangsa, dalam hal ini khususnya Palestina.

Atas dasar sebagai sesama Negara muslim, Soekarno yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden RI berupaya membantu Palestina yang tengah dilanda konflik dengan Negara Israel. Berbagai bantuan telah diupayakan Soekarno atas nama RI. Salah satu bentuk dukungannya adalah, pada tahun 1955 Soekarno mengundang Mufti Jerusalem Haji al-Amin al-Hussein pada Konferensi Asia-Afrika di Bandung dan tidak mengundang wakil Israel. Soekarno juga tidak mengundang Israel untuk ambil bagian dalam Games of the New Emerging Forces (Ganefo) di Jakarta tahun 1962. Selain itu, RI juga mengirim berbagai bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina. Namun, dibalik semua tindakan yang dilakukan Soekarno yang mengatas namakan bantuan RI tersebut, sebenarnya terdapat maksud tersembunyi dari Soekarno. Sikap politik Presiden Soekarno yang anti-imperialisme dan kolonialisme serta lebih condong ke Blok Timur membuat banyak negara dari Blok Barat menekan dan menjadikan Soekarno sebagai target operasi. Sebagai sesama negara muslim, Soekarno berusaha mendekati Palestina dengan jalan menjalin hubungan kedua negara, karena seperti diketahui bahwa Palestina adalah musuh dari negara-negara blok barat. Dengan terciptanya hubungan kedua negara, Soekarno berharap dapat menjadikan Palestina sebagai rekan dan kekuatan baru dalam melawan negara-negara Blok Barat yang sedang mengincar dirinya. Dari hal ini terbukti bahwa bantuan-bantuan RI terhadap Palestina pada masa pemerintahan Soekarno tidaklah murni bantuan antara dua negara sesama muslim, namun terdapat misi lain dari diri Soekarno.

Setelah masa pemerintahan Soekarno berakhir dengan digantinya posisi Presiden RI oleh Soeharto, tidak serta merta mengakhiri hubungan serta bantuan RI terhadap Palestina. Tetapi, bantuan serta dukungan RI-Palestina pada pemerintahan Soeharto dirasa kurang konsisten oleh berbagai pihak. Hal ini terbukti dengan langkah nyata yang dilakukan pemerintah Orde Baru zaman Presiden Soeharto yaitu mengizinkan pembukaan perwakilan PLO di Jakarta pada tahun 1989. Soeharto juga mengundang Yasser Arafat pada KTT Non-Blok di Jakarta pada tahun 1992 lalu disusul memberikan bantuan keuangan. Bahkan, Soeharto pernah menyatakan secara jelas mendukung terwujudnya Negara Palestina Merdeka dengan Jerusalem sebagai ibu kotanya. Akan tetapi, Soeharto juga menerima Perdana Menteri Israel Yitzak Rabin di Cendana pada tanggal 15 Oktober 1993. Lalu, pada tahun 1995 Soeharto bertemu lagi dengan Yitzak Rabin di presidential suite Lantai 41 Hotel Waldorf Tower, New York.

Dengan selesainya masa pemerintahan Soeharto, maka kursi kepemimpinan dipegang oleh Presiden Baharudin Jusuf Habibie. Dalam masa pemerintahannya, Palestina malah banyak dirugikan dengan berbagai putusan yang dibuatnya. Semangat retorika perdamaian rezim Habibie dalam konflik di Palestina adalah suatu retorika perdamaian yang murni. Pemerintah Indonesia dalam tampuk kepemimpinannya berkali-kali menyerukan kepada kedua pihak yang bertikai, agar menghormati seruan dari PBB dan dunia internasional, serta ditaatinya peraturan-peraturan dan hukum internasional. Dalam kasus seperti di Palestina, bahkan

semangat retorika perdamaian itu dilengkapi dengan semangat retorika ASEAN solidarity, moslem brotherhood, dan sebagainya.

Namun dibalik itu ada kepentingan ekonomi atau kepentingan akumulasi kapital, yakni dalam skala besar untuk kepentingan rezim di Indonesia dengan bungkus atau kamuflase retorika Moslem Brotherhood. Inilah hipokrisi yang dipraktekkan dalam politik luar negeri Indonesia yang menyakitkan rakyat Palestina, manakala mereka mengetahui bahwa elit militer dan pelaku elit bisnis rezim Soeharto-Habibie mengadakan praktek-praktek bisnis senjata, telekomunikasi, tekstil, kayu, dan elektronik dengan pemerintah Israel.¹

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, hubungan antara RI-Palestina semakin berkurang. Ketika sehari setelah pembentukan kabinet barunya, Gusdur telah mencengangkan berbagai pihak dengan membuat rencana membuka kembali hubungan diplomatik dengan Israel, khususnya pada bidang perdagangan. Namun upaya tersebut tidak berjalan karena mendapat serangan gencar dari para anggota dewan dan rakyat Indonesia. Hal yang direncanakan Gusdur tersebut tentu sangat bertolak belakang dengan upaya yang telah dilakukan para Presiden terdahulu RI yang telah membela Palestina dalam kancah Internasional, termasuk tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Setali tiga uang dengan ayahnya yaitu Presiden Soekarno, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Indonesia juga berupaya membantu dan membela Palestina dari Israel. Tetapi dukungan tersebut nyatanya tercemari oleh kurang konsistennya Megawati dalam membela Palestina, dikarenakan dalam masa

¹ George, J. Aditjondro, *Moslem Brotherhood or Pure Business Interest*; dalam *The Manila People Forums on APEC (MPFA)*, pada 22-24 November 1996.

pemerintahannya, Megawati lebih condong membuka hubungan dengan Negara Blok Barat seperti Amerika, Jepang, dan Australia yang mana adalah musuh dari Palestina.

Semua perbedaan politik luar negeri RI-Palestina yang dijalankan oleh tiap-tiap presiden RI memberi corak dan alur yang berbeda pula. Hingga pada masa pemerintahan SBY dimulai, berbagai tindakan konkret dan nyata mulai dilakukan sebagai upaya dukungan RI terhadap Palestina.

B. Konsistensi Politik dan Bukti Nyata Pemerintahan SBY dalam Perjuangan Membantu Palestina.

Pada tanggal 20 Oktober 2004 sebagai awal masa dimulainya pemerintahan SBY, dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina tetap berlangsung sebagai prioritas dalam politik luar negeri Indonesia. Hal tersebut dapat tercermin dari kunjungan perdananya ke luar negeri untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin PLO, Yasser Arafat, di Mesir, pada bulan November 2004.²

Dibawah ini adalah beberapa bantuan RI terhadap Palestina pada masa pemerintahan SBY :

- Memprakarsai Program Aksi 10 Tahun OKI, yang didalamnya memuat implementasi dukungan pada Palestina, pada tanggal 7-8 Oktober di Mekah, Arab Saudi.
- Presiden SBY memberikan dukungannya dengan mengupayakan pengaktifan peran forum OKI untuk mendorong peranan kuartet (AS, Uni Eropa, PBB, dan Rusia)

² Siti Mutiah Setiawati, *Peranan Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Israel-Palestina*, makalah disampaikan dalam Seminar Timur Tengah, P2P LTPI Deplu RI, Yogyakarta, 21-22 Februari 2006, Hal. 59

- Indonesia memprakarsai kerjasama pendidikan dan pelatihan bagi 10.000 tenaga kerja Palestina, dalam forum New Asia-Pacific Strategic Partnership (NAPSP).
- Mendorong masuknya Palestina dalam keanggotaan Inter Parliamenter Union (IPU) pada Oktober 2008.
- Memberikan bantuan kemanusiaan sebesar 1 US\$, guna mengurangi penderitaan penduduk sipil Palestina sehubungan dengan terjadinya agresi militer di Gaza.
- Mengecam aksi militer Israel ke Gaza dalam kerangka Sidang Dewan HAM ke-9 pada 9 Januari 2009.

Dalam kesempatan berikutnya bersama dengan Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar dan Ketua Komisi I DPR Theo L. Sambuaga, Agung Laksono memberikan pernyataan dukungan atas perjuangan rakyat Palestina untuk membentuk negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dengan integritas teritorialnya. Agung juga menghimbau agar masyarakat Palestina bersatu dan memperkokoh perjuangannya untuk mewujudkan tujuan nasional Palestina. Pernyataan tersebut juga diikuti dengan desakan kepada pemerintah SBY agar bertindak aktif mendorong penyelesaian konflik Palestina-Israel berdasarkan resolusi-resolusi DK PBB serta kesepakatan-kesepakatan dalam konflik Israel-Palestina.³

Desakan Ketua DPR Agung Laksono juga dialamatkan kepada DK PBB untuk segera mengeluarkan resolusi baru yang lebih tegas terhadap Israel. Dijelaskan lebih lanjut oleh Agung, bahwa penghentian agresi Israel dan pelaksanaan gencatan senjata, serta sanksi-sanksi yang jelas bagi pihak-pihak

DPR Dukung Perjuangan Rakyat Palestina, dalam <http://www.dpr.go.id/index.php?page=berita&id=5623&PHPSESSID=v008be47v56rrjl04f58ga2rp05>, diakses pada 17 Agustus 2010.

merupakan hal terpenting bagi kemajuan proses perdamaian di Timur Tengah. Desakan juga diberikan kepada PBB agar segera mengadakan Sidang Umum Darurat dan membentuk pasukan perdamaian di wilayah tersebut. Lebih lanjut lagi, DPR juga mendesak lembaga-lembaga kerjasama antar parlemen seperti IPU, AIPA, APA, dan PUIC untuk menggunakan pengaruhnya agar penghentian kekejaman yang dilakukan Israel secara nyata telah terbukti sebagai tindakan kejahatan kemanusiaan. Dengan demikian desakan juga disampaikan kepada Mahkamah Kejahatan Internasional untuk mengadili para pelaku agresi sebagai penjahat kemanusiaan,” ditegaskan kembali oleh Ketua DPR RI Agung Laksono.⁴

Atas terjadinya agresi di Gaza, pada akhir Desember 2008, Agung Laksono juga menyatakan kutukannya atas peristiwa tersebut, dan mendesak agar semua pihak terutama PBB untuk segera memberikan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Agar aliran bantuan kemanusiaan dapat mudah diterima korban-korban di pihak Palestina, maka Agung Laksono juga melayangkan desakan agar Israel segera membuka blokade-blokade di wilayah Gaza.⁵

Sehubungan dengan kemenangan Hamas dalam Pemilu Palestina pada tahun 2006, pimpinan DPR RI telah mendeklarasikan terbentuknya Kaukus Parlemen untuk Palestina. Oleh karena, Pemerintahan Palestina dibawah kendali Hamas mengalami pemboikotan internasional. Bahkan kelompok yang kalah dalam Pemilu Palestina beberapa bulan lalu melakukan sejumlah manuver politik dengan mewacanakan Pemilu ulang melalui ide referendum. Terkait hal itu, fraksi PKS DPR RI menyampaikan sejumlah sikap politik.

⁴ *Ibid.*
⁵ *Ibid.*

Perkembangan mutakhir seputar Palestina disampaikan langsung oleh Ketua Badan Hubungan Luar Negeri DPP PKS, yang juga Wakil Ketua BKSAP (Badan Kerja Sama Antar Parlemen) DPR RI Luthfi Hasan Ishaq. Pihak yang kalah dalam Pemilu Palestina telah berupaya ikut dalam arus mensukseskan agenda-agenda Israel dan Amerika. Salah satu caranya, kata Luthfi, dengan memaksa dilakukannya referendum, membentuk pemerintahan baru melalui Pemilu ulang. "Padahal, Pemerintahan HAMAS baru berumur 4 bulan, tapi mereka anggap gagal," katanya, pada tanggal 9 Juni 2006.⁶

Berbagai bantuan yang telah dikucurkan Indonesia pada masa pemerintahan SBY dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Bantuan Politik

Indonesia dalam masa Pemerintahan SBY telah melakukan beberapa tindakan bantuan politik terhadap Palestina, antara lain :

a. Keberhasilan Pemerintah RI Memperjuangkan Palestina Untuk Masuk Inter Parliamentary Union (IPU)

Kontribusi untuk mendukung Palestina dalam kenyataannya juga datang dari lembaga tinggi negara, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang kala itu dikepalai oleh Agung Laksono, menyatakan bahwa Indonesia telah berhasil memperjuangkan Palestina masuk ke dalam keanggotaan Uni Parlemen se-dunia atau disingkat IPU (*International Parliamentary Union*).⁷

⁶ DPR Bentuk Kaukus Parlemen Untuk Palestina, www.keadilan-jepang.org, diakses pada 1 Januari 2010.

⁷ *Ibid.*

Konferensi “*Inter-Parliamentary Union*” (Uni Parlemen Sedunia) yang dibuka di Jenewa, Swiss, ditandai dengan keputusan penerimaan Palestina sebagai anggota penuh, sebagaimana hal itu telah diperjuangkan bertahun-tahun oleh delegasi Indonesia. “Jadi, setelah 30 tahun berstatus sebagai pengamat dan diperjuangkan resolusinya oleh Indonesia, pagi tadi Sidang IPU memulai konferensinya dengan memutuskan menerima Palestina sebagai anggota penuh,” ungkap Theo L. Sambuaga melalui hubungan telepon seluler langsung dari Jenewa, Senin 13 Oktober 2008.

Ketua Komisi I DPR RI ini mendampingi ketua DPR RI, Agung Laksono, bersama sejumlah anggota dewan dari berbagai fraksi menghadiri Sidang Majelis Umum IPU di Jenewa, Swiss. “Dengan diterimanya Palestina sebagai anggota penuh IPU, berarti telah ada pengakuan sebagai negara merdeka dengan integritas teritorialnya,” kata politisi senior Partai Golkar yang pernah menjabat sebagai Presiden Komisi Politik dan Perlucutan Senjata Uni Parlemen Sedunia (IPU) tersebut.

Theo Sambuaga mengharapkan, dengan adanya pengakuan dari IPU tersebut, hal yang sama bisa juga terjadi di lembaga eksekutif dunia, yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), karena sampai sekarang belum menerima Palestina sebagai anggota,” ungkapnya lagi. Keputusan penerimaan Palestina di IPU sendiri, menurutnya, dilakukan melalui voting. “Palestina dimenangkan dengan lebih dari dua pertiga dari 150 anggota IPU” tambah Theo Sambuaga. Dalam keikutsertaannya kali ini, delegasi Indonesia dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Agung Laksono dengan anggota Theo Sambuaga (Ketua Komisi I DPR RI), lalu Ketua Badan Kerja

Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Abdillah Toha, Marzuki Darusman, Tozari Wijaya, dan Tuti Sutrisno.⁸

Sehubungan dengan terjadinya krisis kemanusiaan di Gaza pasca agresi militer Israel di Gaza Desember 2008 silam, bantuan dana sebesar US\$ 1 juta berhasil dikucurkan untuk membantu mengurangi beban penduduk sipil di Jalur Gaza. Hal tersebut merupakan bentuk tindakan pemerintah RI dalam kerangka Sidang Dewan HAM PBB ke-9, pada 9 Januari 2009.⁹

b. Dalam forum Organisasi Konferensi Islam (OKI)

Semenjak keikutsertaannya dalam OKI pada tahun 1972, Indonesia turut berpartisipasi memberikan dukungan dalam proses dan upaya untuk memerdekakan Palestina dari penjajahan Israel. Pada kesempatan 11-18 Oktober 2003, Indonesia berpartisipasi untuk menyetujui " *Declaration On Al-Quds Al-Sharif And Palestine* ". Berlanjut ke pertemuan khusus Menteri Luar Negeri OKI mengenai Palestina dan Al-Quds Al-Sharif, mensponsori deklarasi mengenai Palestina dengan berintikan : (1) OKI akan membentuk Delegasi Tingkat Menteri guna mengadakan kontak dengan para anggota Kuartet, negara-negara anggota PBB dan organisasi internasional terkait guna menjelaskan posisi OKI mengenai perkembangan yang terjadi di Palestina dan (2) Meminta PBB untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian atau tim monitoring di Palestina.

Mengikuti kiprah penerus-penerusnya, maka pada pemerintahan SBY juga berniat kembali meneguhkan kembali posisi dan komitmen, serta dukungannya kepada Palestina. Hal tersebut dapat terlihat antara lain dari partisipasi Indonesia

Ibid.

RI Berhasil Perjuangkan Palestina Masuk IPU, <http://www.beritasore.com/2008/10/14/ri-berhasil-perjuangkan-palestina-masuk-ipu/>, diakses pada 17 Januari 2009

dalam KTT Luar Biasa OKI ke-3, yang dilaksanakan di Mekkah pada tanggal 7-8 Oktober 2005. Hasil dari pelaksanaan pertemuan tersebut antara lain memuat poin-poin dalam kerangka program aksi 10 tahun OKI, yakni sebagai berikut :

- a. Memberikan bantuan kepada otoritas Palestina dalam mengatur seluruh wilayahnya, pembukaan kembali bandara udara dan jalan yang menghubungkan Gaza dengan Tepi Barat.
- b. Meningkatkan solidaritas Islam dan kerjasama dengan masyarakat internasional guna mengakhiri pendudukan Israel atas Palestina dan menghancurkan tembok pemisah sejalan dengan hasil keputusan ICJ dan resolusi terkait PBB.
- c. Menghimbau agar seluruh masyarakat Muslim di dunia dapat menyumbang sekurang-kurangnya US\$ 1 per orang kepada Al-Quds Fund yakni untuk memelihara kelestarian Masjidil Aqsa dan mencegah Yahudinisasi di wilayah itu.¹⁰

Pada beberapa kesempatan selama rangkaian kunjungan ke Timur Tengah tanggal 25 April-3 Mei 2006, menegaskan pandangan pemerintah RI mengenai perlunya memperluas forum yang ada di dalam proses perdamaian Palestina-Israel dengan forum lain di mana Indonesia bersama beberapa negara lain, termasuk Arab Saudi dan OKI, dapat melakukan upaya lain yang bersifat komplementer dan memperkuat proses yang telah ada, termasuk diupayakannya kelompok Kuartet (AS, UE, PBB, dan Rusia).¹¹ Secara prinsipal gagasan tersebut telah mendapatkan

Purnomo A. Chandra, *Peran Indonesia di Organisasi Internasional Negara Berkembang Dalam Upaya Penyelesaian Damai Konflik Israel-Palestina*, makalah disampaikan dalam seminar *Kebijakan Indonesia dalam Konflik Israel-Palestina* Yogyakarta, 21-22 Februari 2006, Hal. 67-68

Siti Mutiah Setiawati, *Peranan Indonesia Dalam Konflik Arab-Israel Setelah Kemenangan Hamas*, makalah disampaikan dalam seminar *Kebijakan Indonesia Dalam Konflik Israel-Palestina*, Yogyakarta, 21 Februari 2006. Hal. 62

dukungan dari beberapa, khususnya OKI, selama lawatan Presiden RI ke Timur Tengah tersebut. Selain daripada itu Presiden juga menyatakan akan menunjuk Utusan Khusus dalam penanganan masalah Palestina.

c. Dalam Forum Gerakan Non Blok (GNB)

Dalam kesempatannya untuk mensponsori deklarasi mengenai Palestina yang intinya meneguhkan kembali dukungan para pemimpin GNB terhadap tercapainya *two state solution* bagi Israel-Palestina, dalam KTT GNB ke-13 di Kuala Lumpur, Malaysia, tanggal 20-25 Februari 2003. Kesempatan tersebut juga menghasilkan kesepakatan untuk mengadakan kunjungan delegasi Komite Palestina GNB, ke wilayah konflik di Palestina.

Berselang setahun kemudian dalam partisipasinya dalam KTM Khusus Komite Palestina di Putrajaya, Malaysia, pada tanggal 13 Mei 2004, Indonesia bersama-sama dengan negara-negara anggota Komite Palestina GNB menyepakati " *Joint Communiqué of the Ministerial Meeting of the Committee on Palestine of the Non-Aligned Movement* ".¹² Kesempatan tersebut dipakai untuk mendorong usaha-usaha perdamaian, dengan poin-poin pernyataan antara lain : (1) Mendorong pembentukan opini dunia terutama dari kalangan " *civil society* " yang mendukung perjuangan rakyat Palestina. (2) Mendorong keterlibatan PBB dalam penyelesaian masalah dimaksud, termasuk kemungkinan pengiriman pasukan penjaga perdamaian (*peacekeeping forces*) ke Palestina. (3) Memanfaatkan secara maksimal negara-negara GNB yang mempunyai posisi strategis di organisasi-organisasi internasional maupun regional guna menggalang dukungan kepada Palestina. (4) Membentuk delegasi tingkat Menteri kepada Presiden Yasser guna menyuarakan dukungan GNB

¹² *Ibid.*

pada Palestina, diantaranya mengadakan pertemuan dengan anggota Kuartet. (5)
Mengadakan pertemuan khusus dalam rangka Sidang Majelis Umum PBB yang membahas mengenai Palestina.¹³

d. Dalam Forum PBB

Pada pemilihan anggota Tidak Tetap DK PBB tanggal 16 Oktober 2006, Indonesia terpilih untuk ketiga kalinya untuk periode 2007-2008. Guna membayar kepercayaan dunia internasional atas pilihan yang diberikan, maka Indonesia memerlukan program kerja. Kontribusi Indonesia seoutar permasalahan regional Timur Tengah, mencakup poin penting yaitu masalah Palestina, yang anatar lain berisi :

- a. RI terus mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri dan mendirikan sebuah negara Palestina merdeka dan berdaulat, sehingga cita-cita hidup berdampingan damai dengan Israel berdasarkan resolusi PBB, Inisiatif Damai 2002 serta Peta Jalan Damai 2003, juga hasil KTT Liga Arab pada Maret 2007.
- b. Dalam rangka memulihkan kembali proses perdamaian di kawasan secara komprehensif maka RI menyerukan beberapa hal yakni,
 - a) Pengakhiran pendudukan ilegal Israel di wilayah palestina dan negara Arab lainnya, sesuai dengan isi Resolusi DK PBB No. 242, yang antara lain memutuskan bahwa Israel harus menarik kembali kekuatan militernya dari daerah pendudukannya pasca perang kedua Arab-Israel pada tahun 1967.¹⁴Lalu dukungan sesuai dengan Resolusi DK PBB No. 338, yang dikeluarkan

¹³ Ilien Halina, *Peran Indonesia sebagai Anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dalam Konflik Palestina-Israel (Quo Vadis Persatuan Nasional Palestina)*. HI-FISIPOL UGM, Yogyakarta, 2008.

¹⁴ Ilien Halina, *loc. cit*

pasca perang antara Israel-Mesir pada tanggal 22 Oktober 1973. Dalam isi resolusi tersebut Dewan Keamanan memerintahkan diberhentikannya perang serta segera dilanjutkannya perundingan antara Mesir-Israel dan Syria-Israel.

- b) Penghentian pendekatan militer dan unilateral Israel atas Palestina.
- c) Kearifan kolektif masyarakat inti untuk mendukung tercapainya solusi komprehensif masalah Palestina sebagai akar persoalan di kawasan Timur Tengah.
- d) Persatuan dan Rekonsiliasi internal Palestina faksi Hamas dan Al-Fatah yang berbeda pandangan mengenai metode perjuangan.
- e) Kelanjutan bantuan keuangan kepada Palestina.

Indonesia terus mendukung upaya kemerdekaan Palestina dengan mengadopsi hasil perundingan Oslo sebagai tindak lanjut dari Resolusi 242 dan 338. Dalam keputusan yang lahir melalui Kesepakatan Damai Oslo pada tanggal 13 September 1993 tersebut, ditetapkan antara lain bahwa, Israel dan PLO bersepakat untuk saling mengakui kedaulatan masing-masing. Hasil keputusan tersebut atas kesediaan Israel untuk menarik pasukannya dari Tepi Barat dan Jalur Gaza guna memberi Arafat kesempatan menjalankan sebuah lembaga semi otonom yang bisa memerintah di kedua wilayah, yakni Tepi Barat dan Jalur Gaza.¹⁵

Lebih lanjut Perjanjian Oslo II sebagai kelanjutan dari perjanjian sebelumnya, mengambil keputusan bahwa Israel dan Palestina bersedia untuk menjalankan " *two state solution*", sebagai kerangka bagi terciptanya kedamaian di wilayah Timur

¹⁵ Politik Luar Negeri Indonesia 2010 difokuskan ke Palestina, dalam <http://id.voa.id/berita-indonesia/politik/766-politik-luar-negeri-indonesia-2010-difokuskan-ke-palestina.html>. diakses tanggal 29 Agustus 2010.

Tengah.¹⁶ Permasalahan yang belum sempat diselesaikan dalam perundingan sebelumnya, pada kesempatan berikutnya telah mendapatkan porsi tambahan seputar solusi spesifik mencakup persoalan seputar :

- a) Status final menyangkut Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur, sesuai dengan usulan yang diberikan oleh pihak Palestina.
- b) Keamanan Israel.
- c) Keamanan Palestina.
- d) Hakikat masa depan negara Palestina.
- e) Nasib para pengungsi Palestina.
- f) Kebijakan-kebijakan pemukiman pemerintah Israel, dan nasib para penduduk di pemukiman Yahudi tersebut.
- g) Kedaulatan terhadap tempat-tempat suci di Yerusalem, termasuk Bukit Bait Suci dan kompleks Tembok (Ratapan) Barat.¹⁷

Dukungan Indonesia terhadap rakyat Palestina juga dinyatakan dalam lembaga tinggi PBB lainnya yakni Dewan HAM PBB. Menurut keterangan resminya, seperti yang dikutip kantor berita ANTARA, Delegasi Indonesia dalam Sidang Khusus Dewan HAM ke-9, pada tanggal 9 Januari 2009, bertempat di Palais des Nations, Jenewa, Swiss. Pembahasan dalam pertemuan tersebut menitikberatkan pada kondisi rakyat Palestina yang memprihatinkan pasca agresi Israel pada bulan Desember 2008.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*
¹⁷ Pernyataan Sikap Pimpinan MPR RI Atas Tragedi Kemanusiaan Di Gaza, dalam <http://www.mpr.go.id/artikel/index.php?detail=10000102220>, diakses pada 17 Agustus 2010
¹⁸ Indonesia Kutuk Pelanggaran HAM Di Palestina, dalam <http://infomudik.antara.ci.id/berita/1231507057/indonesia-kutuk-pelanggaran-ham-israel-di-gaza>, diakses pada 11 Maret 2010

Bentuk pernyataan Delegasi perwakilan RI antara lain menegaskan bahwa rakyat internasional tidak bisa lagi tinggal diam dan menunggu eskalasi pelanggaran HAM dan krisis kemanusiaan yang terus dialami rakyat Palestina di Jalur Gaza. Korban jiwa yang terhitung antara lain menyebutkan bahwa telah jatuh korban sebanyak 700 jiwa, dan 2500 luka-luka termasuk wanita dan anak-anak. Oleh karena itu Delegasi RI mendesak agar Dewan HAM, sebagai lembaga berkompeten untuk menangani isu HAM, segera mensahkan Resolusi keras terhadap Israel.¹⁹

Disamping pernyataan, Delegasi RI juga memberikan usulan agar segera dibentuk "*Rapid Response Team*" untuk memantau pelanggaran HAM di Palestina yang dilakukan Israel sebagai kekuatan pendudukan, segera dihapuskannya blokade ekonomi dan dibukanya akses bagi bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan oleh penduduk sipil. Indonesia meminta Komisaris Tinggi Dewan HAM dan Pelapor Khusus Tematis untuk segera mengunjungi Jalur Gaza agar segera menyusun kajian bagi Anggota Dewan HAM.²⁰

2. Bantuan Ekonomi

Dalam berbagai hal yang telah dilakukan SBY sebagai upaya untuk membantu Negara Palestina, dalam aspek ekonomi dapat dibuktikan oleh Pembentukan Tim Khusus yang bertugas menangani masalah ekonomi Palestina. Tim tersebut diketuai oleh M. Syahron Yusuf. Tim ini bertugas untuk memantau dan mengumpulkan berbagai bantuan yang datang untuk Palestina. Dan, sehubungan dengan terjadinya krisis kemanusiaan di Gaza pada Desember 2008 silam,

Ibid.
Ibid.

bantuan dana sebesar US\$ 1 Juta berhasil dikucurkan untuk membantu mengurangi penderitaan penduduk sipil di Jalur Gaza.

3. Bantuan Militer

Pada 14 Desember 2008, pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan SBY telah mengirimkan 1000 personil Pasukan Perdamaian Garuda TNI ke Palestina untuk membantu rakyat Palestina, sehubungan dengan agresi militer yang tengah terjadi di Jalur Gaza oleh Israel.

4. Bantuan Sosial

Dalam bantuan sosial yang telah diberikan Indonesia pada masa pemerintahan SBY, Indonesia memberikan pelatihan bagi tenaga kerja administratif Palestina. Sesuai dengan semangat baru untuk menghidupkan kembali Konferensi Asia-Afrika tahun 1955, dalam forum New Asia-Pacific Strategic Partnership (NAPSP), hal tersebut ditindaklanjuti melalui penandatanganan Memorandum of Understanding antara Indonesia-Palestina. Kesepakatan tersebut menyebutkan bahwa Indonesia memprakarsai kerjasama pendidikan dan pelatihan bagi diplomat Palestina. Melalui capacity building bagi Palestina tersebut, Indonesia mengharapkan pemerintah otoritas Palestina memiliki kemampuan secara mandiri dalam hal kemampuan administratifnya sendiri.

Kesemua tindakan dan bukti nyata telah dilakukan bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden SBY, yang mana telah membedakan perjuangan bangsa Indonesia dalam membantu Palestina terlepas dari belenggu kesengsaraan oleh Israel, dan juga dalam meraih kemerdekaannya. Hal tersebut menjadi indikator yang

membedakan makna dari *konsistensi* yang dilakukan SBY dibanding dengan para pendahulunya.